

Bab III
Representasi Kekuasaan Soeharto
Dalam Kumpulan Cerpen
Soeharto dalam Cerpen Indonesia

Dalam bab II, struktur kedelapan cerpen yang menjadi objek penelitian dalam SDCI telah diuraikan. Semiotika sastra juga telah mulai diterapkan dalam pencarian relasi cerpen dengan *denotatum*-nya, dalam artian mencari hubungan antara teks dengan konteksnya. Relasi yang dimaksud, adalah seperti dalam uraian di bawah ini.

Delapan cerpen dalam SDCI yaitu: pertama, MB ternyata berelasi dengan kemelut di tubuh PDI pada tahun 1993, BPT berelasi dengan fenomena KKN para pejabat negara serta praktek represi dalam rangka melindungi kepentingan pribadi, PG berelasi dengan karakteristik individu Soeharto sebagai pemimpin negara terutama fenomena status quo dan represi, cerpen “Diam” berelasi dengan praktek pembungkaman aspirasi warga negara atau represi terhadap kritik dan beda pendapat, BTS berelasi dengan proses turunnya Soeharto dari jabatan presiden, “Celeng” berelasi dengan praktek penghilangan paksa atau praktek militerisme orde baru, “Senotaphium” berelasi dengan rekayasa seputar dihentikannya penyidikan terhadap Soeharto, dan terakhir, GKMR berelasi dengan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto serta menyinggung juga masalah militerisme.

Dengan demikian, pada relasi kedelapan cerpen tersebut terdapat benang merah yang menghubungkan semuanya, berupa aspek ke-Soeharto-an, terutama dalam hal kekuasaan yang dimilikinya.

Relasi yang diperoleh dari kedelapan cerpen di atas merupakan awalan untuk menuju pemaknaan selanjutnya pada bab ini. Perbedaan antara relasi bab II dengan pemaknaan pada bab III adalah, jika pada bab II analisis makna didasarkan pada unsur-unsur struktur dari delapan cerpen dalam SDCI sebagai elemen kode dan makna yang dinyatakan oleh unsur-unsur strukturnya yang muncul dalam konteks pemakaian, dalam bab III analisis makna ditujukan untuk mencari nilai substansial dari cerpen-cerpen tersebut. Artinya, relasi pada bab II mengacu pada makna pertama, sedangkan bab III mengacu pada makna kedua.

Selanjutnya, berangkat dari struktur cerpen dan relasi yang telah ditemukan, kedelapan cerpen dalam SDCI ini dapat dimaknai dengan dikelompokkan ke dalam enam nilai pokok tentang kekuasaan Soeharto. Hal ini disebabkan karena masing-masing cerpen memiliki kecenderungan untuk menyinggung masalah yang sama meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda.

Enam nilai pokok yang diperoleh dalam pemaknaan kedelapan cerpen ini akan diuraikan secara berurutan berdasarkan logika kronologis jalannya pemerintahan orde baru sebagai pengejawantahan kekuasaan Soeharto, yang termuat dalam cerpen, yaitu:

3.1 Fenomena Kudeta dalam Peralihan Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto identik dengan penggantian nama dari orde lama ke orde baru. Penamaan ini bisa jadi merupakan strategi persuasif pemerintahan Soeharto untuk mensubordinasikan citra pemerintahan Soekarno dengan menegaskan posisi pemerintahannya sebagai “yang baru”. Frase tersebut dapat diartikan sebagai kondisi yang lebih baik, atau jika tidak demikian, paling tidak, menjadi alternatif dari yang lama.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tersebut secara *de facto* terjadi sejak Maret 1966 melalui dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas maret yang ikonis dengan cerita dalam cerpen GKMR. Supersemar yang pada dasarnya hanya dimaksudkan sebagai surat perintah biasa dari Presiden kepada Pejabat Militer itu dimanipulasi Soeharto dalam rangka mengambil alih kekuasaan, sebagaimana tokoh Rahwana yang memanfaatkan kepercayaan Raja untuk merebut tahta.

Cerpen GKMR mengemukakan sebuah wacana baru tentang proses kenaikan Soeharto menjadi presiden. Soeharto sebagai *denotatum* dari tokoh Maharaja Rahwana, dalam mencapai kedudukan sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara melalui proses manipulasi. Dalam bahasa politik hal seperti ini dapat dikategorikan sebagai kudeta, mengacu kepada pengertian yang diberikan Edward Luttwak bahwa kudeta adalah “infiltrasi ke dalam suatu segmen aparatus negara yang kecil tapi menentukan yang kemudian digunakan untuk mengambil



alih pemerintahan dari kendali unsur-unsurnya”¹¹⁰. Artinya, kudeta sebagai proses tidak harus disertai dengan pertumpahan darah atau pemaksaan secara fisik, sebagaimana yang terjadi dalam peralihan Soekarno-Soeharto.

Kudeta merupakan fenomena yang sering terjadi negara dunia ketiga. Hal itu sering disebabkan ketidakmampuan penguasa untuk mengelola negara dengan baik, atau karena situasi yang sangat tidak mendukung untuk terjadinya hal tersebut. Akibatnya, timbullah ketidakpuasan pada pihak-pihak tertentu. Sering dalam kebanyakan kasus, militer merupakan pelaku utama karena memiliki sarana dan prasarana memadai. Dalam hal ini, Rahwana sebagai *ground* dan Soeharto sebagai *denotatum* juga mempunyai latar belakang militer.

Hal demikianlah yang mengemuka dalam cerpen GKMR. Relasinya dengan proses pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto membawa asumsi baru yang tak pernah dinyatakan sedemikian terbuka sebelumnya.

Situasi politik, sosial dan ekonomi pada masa terjadinya peristiwa tersebut sedang mengalami instabilitas. Dalam masalah ekonomi misalnya, terjadi krisis yang tak kunjung terselesaikan seperti terlukiskan dalam cerpen sebagai berikut: “Di sebuah hutan beton yang penuh dengan pohon-pohon raksasa dia melihat sejumlah rakyatnya yang tergeletak kelaparan di bawah pohon-pohon beton raksasa itu.”¹¹¹

¹¹⁰ Edward Luttwak, *Kudeta Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*, (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya: 1999), hal. 22.

¹¹¹ Sunaryono Basuki K.S., M. Shoim Anwar(ed.), *op.cit.*, hal.118.

Situasi sosial yang tak menguntungkan juga terjadi pada saat yang sama, berupa kesenjangan sosial yang demikian tinggi hingga mengakibatkan kecemburuan sosial kepada etnis Cina:

“Banyak yang mencurigai banyaknya taukeh Cina yang menumpuk beras di gudang sampai harganya melambung. Kalaupun ada di pasaran, jumlahnya tidak banyak, dan hanya orang-orang berduit saja yang mampu membeli beras. Orang-orang yang berumah mewah dan bermobil. Rakyat harus makan bulgur!¹¹²”

Selain situasi sosial dan ekonomi, situasi politik saat itu juga tengah memanas. Situasi ini tak tak tereksplisitkan dalam cerpen. Beberapa waktu sebelumnya telah terjadi kudeta militer yang gagal oleh PKI dan banyak suara menuntut Soekarno turun dari jabatannya. Presiden Soekarno seakan tak kuasa menangani situasi tersebut, sehingga ketika Soeharto menyatakan diri siap untuk mengendalikan situasi apabila diberi kepercayaan, Raja akhirnya memberikan mahkotanya, sebagai *ground* tanda untuk Surat Perintah Sebelas Maret 1966.

Setelah situasi berada di bawah kendalinya, Soeharto ternyata tidak mau mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, seperti yang dilakukan oleh gadis kecil jelmaan Panglima Rahwana. Akibatnya, Raja atau Soekarno kehilangan kekuasaannya secara *de facto*.

Dengan demikian, karakteristik kekuasaan Soeharto yang dapat ditemukan dalam cerpen GKMR ini adalah tentang cara Soeharto dalam memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi situasi sosial, politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan.

¹¹² *Ibid.*, hal. 117.

Kesimpulan di atas merupakan asumsi atas peristiwa faktual yang terjadi, berelasi dengan asumsi penulis yang tersirat dalam cerpen.

Barangkali karena cara pemerolehannya yang demikian, maka Soeharto menerapkan kebijakan militeristik dalam kepemimpinannya sebagai usaha mengantisipasi gugatan, perlawanan ataupun perebutan kekuasaan dengan cara yang sama dengan yang pernah ia gunakan.

Cerpen GKMR mengemukakan wacana baru berkaitan dengan masalah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yaitu bahwa di dalamnya terdapat nuansa kudeta. Meskipun dalam relasinya terdapat sejumlah fakta yang mendukung wacana tersebut, masalah ini tidak dapat dimasukkan dalam diskursus sejarah nasional Indonesia karena karya sastra dalam kapasitasnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti sejarah.

3.2 Fenomena KKN dan Pengabaian Hajat Hidup Rakyat Kecil

Setelah memegang kekuasaan kepresidenan secara resmi, Soeharto mengelola pemerintahan negara yang sarat dengan nuansa KKN. Tradisi KKN seakan telah menjadi budaya dari bangunan orde baru. Kerumitan birokrasi yang menimbulkan praktek-praktek pungli, hingga kegiatan terang-terangan mengeruk uang negara yang dilakukan oleh para pejabat menjadi isu yang tidak populer pada masa tersebut, sebagaimana terungkap dalam pemaknaan cerpen BPT.

Praktek KKN merupakan salah satu bentuk nyata ketidakadilan sosial dalam pemerintahan orde baru. Kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme ini telah menjadi penyakit yang berurat akar dan membelit ke dalam struktur pemerintahan

dari tingkat paling atas hingga paling bawah. Ada alasan hipotetis atas terjadinya kondisi demikian, seperti analisis Hendardi yang menyatakan bahwa seluruh jajaran aparatur negara pada masa orde baru berkembang dalam lingkungan KKN. Asal mulanya, KKN pada masa orde baru sangat berkaitan dengan patronase bisnis. Para pejabat menjadi patron bagi para pengusaha yang ingin sukses. Sistem patronase harus diikuti dengan KKN di tingkat lebih bawah untuk menghindari gugatan¹¹³.

Penelusuran lebih jauh terhadap kondisi tersebut mengarahkan pemahaman kepada oknum penguasa dalam hal ini pejabat yang dalam cerpen diwakili sosok presiden sebagai *ground* dengan *denotatum* Soeharto, untuk memperkaya diri sendiri dalam masalah ekonomi. Mereka memanfaatkan posisi politis strategis mereka untuk mempermudah fasilitasi para pelaku bisnis dengan imbal balik berupa keuntungan material. Guna memperlancar hal tersebut, mereka harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada jajaran birokrasi di bawahnya untuk melakukan kegiatan serupa dalam skala yang bervariasi.

Hipotesis kedua dari patronase bisnis ini berkaitan dengan masalah politis. Pemerintah yang tengah berkuasa berusaha memberikan konsesi-konsesi berupa kemudahan atau fasilitas kepada pelaku ekonomi sebagai balasan atas dukungan besar mereka terhadap pemerintah tersebut. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengatasi perlawanan kaum elit dan menengah. Artinya, KKN dilakukan dalam rangka mobilisasi partisipasi politik warga negara.

¹¹³ Hendardi, KKN dan Ekonomi Kerakyatan', *Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara: 1999), hal. 49-50.

Cerpen BPT, melalui tokoh Peang dan Dayat merepresentasikan situasi yang dialami oleh rakyat kecil ketika mulai sadar dari kebodohnya. Ketika mereka berniat memperbaiki keadaan dengan melawan ketidakadilan yang mereka alami dengan cara mengadu kepada pihak yang berwenang, usaha mereka terbentur kepada kenyataan bahwa penguasa dalam melindungi kepentingannya sendiri, mampu bertindak represif. Masalah ini merujuk kepada salah satu karakteristik kekuasaan Soeharto yang lain yaitu represifitas, akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Dengan berlangsungnya praktek-praktek KKN demikian, pemerintah atau penguasa melupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara, yaitu rakyat kecil, karena terlalu sibuk berlutut dengan masalah elit. Rakyat kecil yang diwakili tokoh Peang dalam cerpen, menjadi korban pengabaian hajat hidupnya. Penggusuran yang dilakukan atas kepentingan pembangunan merupakan bukti nyata berseberangnya pemerintah yang bergulat dengan kepentingan-kepentingan bisnis dengan kepentingan rakyat kecil.

Dari uraian di atas kembali ditemukan salah satu ciri khas Soeharto dalam menjalankan kekuasaan berupa pengabaian kepentingan dan hajat hidup rakyat kecil demi kepentingan elit.

3.3 Fenomena Represi Politik dalam Pemerintahan Orde Baru

Satu lagi karakteristik kekuasaan Soeharto yang terkuak dalam pemaknaan terhadap cerpen objek penelitian adalah represivitas terhadap kritik dan beda pendapat. Ada dua jenis represifitas yang diterapkan dalam orde baru tersebut,

yaitu represivitas berupa pembatasan kebebasan mengeluarkan pendapat dan depolitisasi warga negara, serta represivitas yang bersifat militeristik.

Masalah represivitas ini mengemuka hampir dalam semua cerpen yang menjadi objek penelitian, namun cerpen yang fokus kepada masalah ini adalah cerpen “Diam” dan “Celeng”. Cerpen “Diam” mengacu kepada kategori represi jenis pertama, sedangkan “Celeng” mengacu kepada kategori kedua.

Kebijakan pemerintah orde baru tersebut menunjuk kepada person Soeharto, dengan demikian menegaskan sikap pribadinya dalam menghadapi kritik. Ketika berbicara tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, ia selalu menambahkan dengan frase “yang bertanggung jawab”¹¹⁴. Lebih jauh ia menyatakan dengan berbagai penekanan bahwa ia menerima perbedaan pendapat asalkan tidak berlebihan sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut: “Tetapi, kalau ucapan-ucapan dan pernyataan-pernyataan mereka itu sudah keterlaluan melanggar hukum, dengan sendirinya perbuatan mereka itu bisa saja dihadapkan ke pengadilan.”¹¹⁵ Dalam prakteknya, segala retorika tersebut mewakili tindakan penghambatan aspirasi masyarakat.

Kategori pertama, terungkap dalam pemaknaan cerpen “Diam”. Dalam pemaknaan pertama, ditemukan relasi cerpen “Diam” dengan budaya politik masa orde baru yang tidak mengenal beda pendapat dan oposisi karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan konflik yang mengganggu stabilitas nasional. Situasi ini mengakibatkan suasana berdemokrasi menjadi tidak sehat karena masyarakat

¹¹⁴G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 442.

¹¹⁵*Ibid.*, hal. 441.

memilih untuk diam tanpa mengemukakan aspirasinya daripada harus berhadapan dengan aparat negara.

Pers sebagai corong aspirasi masyarakat menjadi mandul karena tidak berfungsi optimal. Berita-berita yang mereka sajikan, meski berupa kebenaran, harus disesuaikan dengan ketentuan penguasa atau penerbitan pers tersebut akan dicap sebagai pers yang kurang bertanggung jawab dan mendapat sangsi berupa pembredelan atau pencabutan SIUPP.

Mengenai fenomena tersebut, Soeharto tetap saja beralasan bahwa menurutnya, pers tersebut dengan tujuan komersil dan motif lainnya, menyajikan berita-berita yang sensasional tanpa memperhatikan nilai kesusilaan, sopan-santun, kerahasiaan negara serta akibat tulisan yang dapat mengguncangkan masyarakat sehingga alat-alat negara terpaksa mengambil tindakan untuk mendisiplinkan pers agar lebih bertanggung jawab¹¹⁶. Hal sama juga terjadi pada wilayah-wilayah lain seperti kesenian. Pada cerpen BTS hal ini diikonkan dengan pelarangan pertunjukan wayang yang berbau subversif atau menentang penguasa.

Kondisi demikian oleh Eep Saefulloh Fatah disebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM pada masa orde baru berupa pembatasan partisipasi politik atau depolitisasi, yaitu mengingkari hak yang dimiliki warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat¹¹⁷. Dalam hal ini, aparat negara semisal militer dan aparat hukum lainnya sebagai *denotatum* dari “orang-orang yang memiliki kecepatan pendengaran supersonik” dalam “Diam”,

¹¹⁶ *Ibid.*, hal.425.

¹¹⁷ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2000), hal.103-104.

bertindak sebagai wakil negara yang harus dilindungi kepentingannya. Ironisnya, negara bukan dianggap sebagai bangunan warga negara, melainkan diidentikkan dengan penguasa.

Jenis represivitas yang kedua, yaitu represivitas militeristik terungkap dalam pemaknaan cerpen “Celeng”. Kegiatan penghilangan paksa yang berelasi dengan cerpen ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 3 Deklarasi Semesta HAM menetapkan : *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”* (Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan rasa aman). Dinyatakan pula dalam Covenant on Civil and Political Right, pasal 6 ayat 1: *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his (or her) life”*¹¹⁸ (Setiap manusia mempunyai hak yang setara untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tak ada seorangpun yang boleh mencabut hak tersebut secara sembarangan). Dengan demikian, kegiatan penghilangan paksa melanggar hak asasi yang paling utama, yaitu hak untuk hidup.

Hal yang mengemuka dari kasus penghilangan paksa demikian adalah represi militer yang dilakukan pemerintahan Soeharto sebagai *denotatum* atas *ground* tokoh Celeng. Kegiatan penghilangan paksa ini pada umumnya dilakukan terhadap kelompok-kelompok ataupun perorangan yang kritis atau dianggap merongrong kewibawaan negara sebagaimana disinyalir oleh Munir¹¹⁹ , jadi bersifat politis.

¹¹⁸ Hendarji, *Penghilangan Paksa. Mengungkap Kebusukan Politik Orde Baru*, (Jakarta, Grasindo: 1998), hal. 3.

¹¹⁹ *Ibid.* Hal 81.

Pada dasarnya kegiatan ini serupa dengan praktek pembungkaman aspirasi yang terwakili dalam cerpen “Diam”. Perbedaannya terletak pada sarana serta perangkat negara yang berperan. Pada jenis pertama, perangkat negara yang berperan adalah perangkat hukum yang secara legal formal dapat diterima dan bersifat terbuka. Artinya, kasus – kasus yang termasuk kategori ini diketahui oleh khalayak ramai. Pada jenis kedua berperan perangkat militer serta kekuatan senjata secara langsung tanpa proses hukum. Dalam kaca mata hukum tindakan ini ilegal dan oleh karenanya sangat dirahasiakan. Artinya, pada jenis pertama terjadi pelanggaran HAM terselubung sedangkan jenis kedua adalah pelanggaran HAM yang sangat nyata.

Kegiatan penghilangan paksa mewakili praktek represivitas militeristik dalam penanganan atau antisipasi konflik politik. Praktek tersebut menggunakan cara-cara yang melanggar dan mengabaikan HAM.

Sebelum Soeharto turun, masyarakat Indonesia demikian terdoktrinasi dengan alasan-alasan keamanan dan subversivitas, sehingga tak pernah menggugat atau mempertanyakan apabila militer melakukan tindakan-tindakan represif terhadap sekelompok warga. Potret kebodohan warga kota itu tampak dalam kutipan berikut: “Kenapa mereka tak bersahabat dengan kami? Kenapa mereka menghalang-halangi kami? Kami tak mengerti. Bukankah kami hanya hendak menangkap celeng? Lalu kenapa mereka arahkan senapan ke dada kami?”¹²⁰

¹²⁰ Agus Noor, M. Shoim Anwar (ed.), *op.cit*, hal 99.

Semuanya baru terbuka lebar-lebar; penuh fakta mencengangkan yang sebelumnya hanya sekedar menjadi rahasia umum, setelah Soeharto turun dari jabatan kepresidenannya. Kondisi ini diwujudkan dalam *ground* keterkejutan tokoh para pemburu ketika menemukan bahwa celeng pembunuh yang mereka buru berasal dari jalan Cendana.

Cerpen yang juga menyinggung isu represivitas adalah “Bapak Presiden yang Terhormat”, “Paman Gober”, “Bukan Titis Semar” dan “ Gadis Kecil dan Mahkota Raja”.

3.4 Fenomena Rekayasa Politik Orde Baru dalam Mempertahankan Status Quo

Salah satu kunci keberhasilan Soeharto mempertahankan status quo kepemimpinannya adalah rekayasa kehidupan politik warga negara. Praktek berdemokrasi yang terwujud dalam pendirian partai-partai politik dimaknai secara subjektif oleh pemerintah orde baru. Kondisi demikian menonjol dalam pemaknaan cerpen MB.

Cerpen MB yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1993, secara ikonik berelasi dengan proses pergantian kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia pada tahun yang sama. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, kemelut itu terjadi akibat anarkisme di tengah Munas dan keputusan kontroversial memilih kembali Soerjadi sebagai ketua umum. Pemerintah akhirnya turut campur tangan sehingga Soerjadi harus turun dari jabatannya tersebut. Salah satu alasan dijatuhkannya Soerjadi adalah kenyataan

bahwa perolehan suara PDI meningkat di bawah kepemimpinannya. Hal yang sejalan dengan alasan penembakan banteng pada cerpen MB, yaitu populasi yang terlalu besar.

Campur tangan pemerintah dalam kemelut PDI yang menjadi relasi cerpen MB menunjukkan kebuntuan serta stagnasi penyaluran aspirasi masyarakat melalui partai politik pada masa tersebut.

Pemerintah orde baru membentuk anggapan bahwa Golkar, partai pemerintah, adalah satu-satunya saluran aspirasi yang sah. Keberadaan dua partai politik lain, yaitu PPP dan PDI hanya berfungsi sebagai pelengkap sarana pemerintahan demokrasi. Dengan demikian, PPP dan PDI harus tetap ada berdasarkan alasan yang telah disebutkan, namun keberadaannya harus senantiasa dikontrol dan dipertahankan agar tetap berada dalam kondisi "ideal". Kondisi ideal yang dimaksud adalah konsistensi kekuatan yang tetap berada dalam posisi minoritas. Hal demikianlah yang terjadi pada komunitas banteng sebagai *ground* untuk *denotatum* Partai Demokrasi Indonesia yang harus dikurangi populasinya, sebagaimana terlihat dalam instruksi yang diberikan kepada Jendral Purnawirawan Basudewo sebagai berikut: "... yang penting populasi kembali seimbang dengan daya dukung taman nasional."¹²¹

Kondisi ideal demikian dalam pemerintahan orde baru, dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu kepada partai pemerintah/Golkar. R. William Liddle menjelaskan proses tersebut dengan

¹²¹ F. Rahardi, M. Shoim Anwar (ed.), *Ibid*, hal. 2.

dibatasiya partai peserta pemilu menjadi hanya tiga parpol. Golkar sebagai partai pemerintah merupakan wajah politik partisan dari birokrasi negara. Setiap lima tahun sekali, semua pejabat termasuk kepala desa yang dipilih, dikerahkan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Para pegawai tersebut dilarang bergabung dengan PPP dan PDI. Pejabat dan tentara pensiunan dijadikan pemimpin Golkar di tingkat nasional, provinsi maupun lokal¹²².

Hal inilah yang disebut oleh Huntington dan Nelson¹²³ sebagai mobilisasi partai politik. Masyarakat, dalam melakukan kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini pemerintah sendiri. Terkadang, mobilisasi tersebut juga dilakukan dengan cara-cara represi atau pemaksaan.

Hal lain yang dapat dicermati dari kasus PDI dalam relasinya dengan cerpen MB adalah bahwa pemerintah, dalam usahanya untuk membatasi populasi banteng atau pendukung PDI, juga melakukan infiltrasi ke dalam tubuh partai politik. Soerjadi atau banteng jantan tua sebagai *ground*-nya, menjadi ketua umum PDI akibat campur tangan pemerintah. Artinya, bisa jadi pemerintah mencoba memasukkan orang-orang yang dianggap “dapat dikendalikan” ke dalam tubuh parpol untuk mencegah parpol tersebut melakukan manuver-manuver yang mengancam stabilitas politik. Soerjadi sendiri bisa jadi pula tidak mengetahui skenario tersebut, sehingga ketika langkah-langkah politiknya mulai melenceng dari garis yang ditetapkan pemerintah atau penguasa, ia harus dihentikan.

¹²² R. William Liddle, Donald K. Emerson (ed.), “Negara Ekonomi, Masyarakat Transisi”, *Indonesia Beyond Soeharto*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2001), hal. 68-69.

¹²³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta, PT Rineka Cipta: 1994), hal. 4.

Dari uraian di atas, ditemukan salah satu kecenderungan perpolitikan Soeharto sebagai penguasa orde baru berupa manipulasi serta rekayasa politik. Artinya, semua aset politik dalam sistem pemerintahan, dikelola serta dikondisikan sedemikian rupa hingga mencapai stabilitas yang menguntungkan penguasa itu sendiri. Fenomena ini bisa jadi merupakan “resep” awetnya pemerintahan soeharto, selain karena praktek represi yang telah diuraikan sebelum ini.

Kondisi status quo demikian termuat dalam cerpen PG. Tokoh paman Gober sebagai *ground* dari Soeharto, menduduki jabatan kepresidenan terlalu lama, sehingga gagasan tentang pergantian kekuasaan terasa semu, sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut:

“Maka hari hari pun berlalu tanpa pergantian pimpinan, karena memang hanya ada satu pemimpin. Segenap pengurus bisa dipilih berganti-ganti, namun kedudukan Paman Gober tidak pernah dipertanyakan. Para pelajar seperti Kwak, Kwik, dan Kwek menjadi bingung bila membandingkannya dengan sejarah kepemimpinan kota-kota lain. Kota Bebek seolah-olah memiliki pemimpin abadi. Generasi muda yang lahir setelah Paman Gober berkuasa bahkan sudah tidak mengerti lagi, apakah pemimpin itu memang bisa diganti. Mereka pikir keabadian Paman Gober sudah semestinya.”¹²⁴

Soeharto bertahan menjadi presiden begitu lama, bisa jadi karena merasa telah berhasil membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, sebagaimana kesombongan yang dilontarkan tokoh Paman Gober sebagai berikut: “ ‘Coba kalau aku tidak membangun jalan, air mancur dan monumen, apa jadinya Kota Bebek?’ ”¹²⁵. Sifat *overconfidence* ini juga dilukiskan dalam perasaan Kepala Desa Kadhungmakmur pada cerpen BTS, yang merasa sebagai titisan Semar.

¹²⁴ Seno Gumira ajidarma, M. Shoim Anwar (ed.), *op.cit.*, hal. 24.

¹²⁵ *Ibid.*, hal 23.

Akibatnya, ia terus berusaha mempertahankan kondisi status quo baik dengan jalan legal ataupun ilegal.

Kondisi demikian, beserta segala kebijakan Soeharto dalam mempertahankan kekuasaan yang sering bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak, menimbulkan kejenuhan dan rasa perlawanan muncul dalam hati mereka. Karena tindakan pro aktif selalu kandas oleh praktek represi, maka jadilah kemarahan terpendam. Kebuntuan situasi dan frustrasi kolektif ini dilukiskan dengan kegiatan rutin penduduk kota bebek atau rakyat Indonesia sebagai denotatum-nya, berupa membuka koran tiap pagi untuk mencari berita kematian Paman Gober. Dari sinilah berawal masalah yang akan dibahas dalam subbab selanjutnya.

3.5 Proses Delegitimasi Kekuasaan Soeharto

Dalam subbab sebelum ini telah diuraikan alur situasi status quo yang menimbulkan delegitimasi rakyat terhadap kekuasaan soeharto. Proses delegitimasi kekuasaan Soeharto tersebut terkuak lebih lanjut dalam pemaknaan cerpen BTS, setelah sebelumnya juga mengemuka dalam pemaknaan cerpen PG.

Tahap selanjutnya dari kemarahan kolektif rakyat yang terpendam dalam cerpen PG adalah titik jenuh yang tak tertahankan akibat akumulasi sedemikian lama. Dalam relasi faktual, titik jenuh tersebut meletus dalam wujud pergerakan mahasiswa dan masyarakat yang membuahkan kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998.

Proses menuju pergerakan massa tersebut sebenarnya telah berawal jauh-jauh hari, sejak pemerintahan Soeharto tengah berada dalam masa jayanya.

Pada masa awal kepemimpinannya hingga awal dekade 90-an, Soeharto dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengelola negara. Titik berat pemerintahannya pada pembangunan ekonomi berhasil membawa Indonesia ke arah kemajuan yang cukup signifikan. Keberhasilan tersebut membuatnya menjadi sosok yang disegani baik di dalam atau di luar negeri. Sikap segan tersebut pada akhirnya mengarah kepada kultus individu. Soeharto dianggap selalu benar dan kesalahan-kesalahannya dianggap sebagai kewajaran, seperti kutipan dari cerpen BTS berikut:

“Bahwa yang terjadi kemudian adalah justru tumbuh kembangnya sifat adigang-adigung-adiguna, korup, serakah dan semua sifat-sifat lain yang merupakan tanda semakin terlepasnya kendali nafsu duniawinya, dia masih juga memakai keyakinannya – bahwa dirinya tak lain dan tak bukan adalah titisan Kiai Semar – sebagai dasar pembelaannya.¹²⁶”

Hal demikian boleh jadi disebabkan oleh pengaruh hegemonik Soeharto atau *ground* tokoh Kepala Desa kadhungmakmur, yang begitu kuat melingkupi suasana kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu kuatnya pengaruh tersebut hingga disetarakan dengan Dewa (Tuhan dalam mitologi wayang), seperti dinyatakan dalam deskripsi tokoh Kepala Desa kadhungmakmur berikut:

“ ... anda sungguh akan dibuat terpesona oleh langkah-langkahnya yang tidak hanya mantap, gesit dan gagah, tetapi juga sangat manis. Begitu agung. Itu pun kalau kata lainnya sebelumnya tadi. Boleh jadi batin anda akan berkata: ‘Apakah aku telah melihat seorang dewa?’¹²⁷”

¹²⁶ Bonari Nabonenar, M. Shoim Anwar (ed.), *op.cit.*, hal.56.

¹²⁷ *Ibid.* Hal. 54.

Namun masyarakat yang kritis mulai melihatnya sebagai kesalahan yang harus dibenahi meski tak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan Soeharto dalam memanfaatkan aparat negara untuk mengelola wacana perpolitikan nasional agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Semua aspek kehidupan masyarakat senantiasa dimonitor agar dapat lebih cepat diantisipasi apabila muncul friksi-friksi. Tak terkecuali dalam wilayah kesenian, yang direpresentasikan dengan pertunjukan wayang. Pertunjukan tersebut dilarang karena dianggap berisi sindiran tentang kepemimpinan Kepala Desa Kadhungmakmur. Begitu pula yang terjadi dalam kenyataan. Seringkali pementasan-pementasan kesenian harus berhadapan dengan masalah pencekalan karena dikhawatirkan menyebarkan wacana politis kepada masyarakat luas. Dalam hal ini terjadi pula represi dan pengungkungan aspirasi.

Namun segala usaha tersebut pada saatnya tidak akan bermanfaat lagi. Kekuatan rakyat yang bersatu akan dapat melemahkan pertahanan seorang pemimpin yang tak lagi mempunyai legitimasi atas kekuasaannya. Faktor-faktor lain juga turut berperan dalam proses ini, seperti tekanan dari pihak asing, yaitu Amerika yang dalam cerpen BTS menjadi *denotatum* untuk tokoh Camat.

3.6 Sisa-Sisa Kekuasaan Soeharto

Subbab terakhir ini membahas makna yang berbeda dengan subbab-subbab sebelumnya. Jika yang lain berbicara tentang karakteristik kekuasaan Soeharto, subbab ini justru membahas situasi pasca kepemimpinan Soeharto, yaitu yang

berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap terdakwa Soeharto, yang merupakan relasi dari cerpen “Senotaphium”.

Dalam pemaknaan cerpen BTS sempat disinggung tentang besarnya hegemoni kekuasaan Soeharto dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Soeharto turun secara memalukan dari kursi presiden dan menuai tuntutan atas kebijakan-kebijakannya di masa lalu, kekuasaan Soeharto tidak langsung lenyap begitu saja. Kekuasaannya terletak pada masih banyaknya loyalis-loyalis yang tidak rela akan perlakuan yang diterimanya. Asumsi inilah yang coba dimunculkan dalam cerpen “Senotaphium” ketika terjadi teror bom:

“Lantas orang-orang pun menduga bahwa itu mungkin pertarungan antar geng yang berpihak pada Papa Hartanaga dan yang menentangnya. Ada kelompok yang membalas dendam atas kematian Papa Hartanaga yang begitu hina. Ya, bagaimanapun Papa Hartanaga memiliki jaringan yang tidak bisa diduga. Selama puluhan tahun berkuasa di negeri Inkolonesia, Papa Hartanaga memang tak memiliki batas kekuasaan. Ia memiliki separo lautan.¹²⁸”

Asumsi tersebut berdasar pada bersamaannya momen terjadinya teror bom dengan penghentian proses penyidikan terhadap Soeharto karena dinyatakan sakit.

Dari kutipan di atas juga dikemukakan asumsi bahwa kekuasaan Soeharto sangat besar. Ia dapat berbuat apa saja untuk membebaskan dirinya dari jerat pengadilan.

Pada akhir cerita, diketahui bahwa kematian Papa hartanaga sebagai *ground* sakitnya Soeharto dan orang-orang dekatnya adalah rekayasa dan selama

¹²⁸ Agus Noor, M. Shoim Anwar (ed.), *op.cit.*, hal.109.

berada dalam persembunyiannya, berupa kota dalam makam, Papa Hartanaga telah menyusun kekuatan untuk kembali berkuasa seperti semula.

Pada tahap ini, sekali lagi pengarang mengemukakan asumsi tentang rekayasa seputar dihentikannya penyidikan terhadap mantan Presiden Soeharto. Artinya, alasan sakit yang digunakan Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap Soeharto hanyalah strategi yang dijalankan untuk mengamankan Soeharto dari jeratan hukum. Sementara di tempat perlindungannya, Soeharto tengah mempersiapkan diri atau penerusnya untuk kembali berkuasa di bumi Indonesia.

Asumsi ini tampaknya hampir menjadi kebenaran dengan munculnya Tutut atau Siti Hardiyanti Indra Rukmana, putri tertua Soeharto dalam kancah perpolitikan Indonesia. Tutut yang dikenal paling aktif dalam bidang politik, pada kampanye Pemilu legislatif 2004 dicalonkan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebagai calon presiden.

Sebagai kesimpulan, semua rekayasa tersebut di atas dapat terjadi tentu saja karena Soeharto masih mempunyai kekuasaan cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia melalui tangan para loyalisnya dalam struktur pemerintahan.

Sekali lagi, pemaknaan terhadap cerpen "Senotaphium" ini berdasar pada relasi asumptif yang bisa jadi dikemukakan oleh pengarang sebagai wacana baru.

Keenam poin nilai yang dihasilkan dari proses pemaknaan terhadap kedelapan cerpen dalam SDCI di atas menjadi wujud penggunaan kekuasaan yang

tidak didasari hati nurani, sehingga kekuasaan seakan menjadi tanpa batas. Soeharto sebagai pemimpin negara yang seharusnya menjadi pengayom kehidupan rakyat justru berbalik menjadi ancaman bagi rakyat. Kekuasaan yang dimilikinya diperlakukan selaku perusahaan pribadi sehingga dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi.

Fenomena demikian dapat terjadi pada negara dan sistem pemerintahan manapun apabila mekanisme kontrol tidak berjalan dengan baik.

BAB IV
EMPRESA

Mulli Jasa